

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

2023

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan
Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syeh Nawawi
Albantani – Serang

IKHTISAR

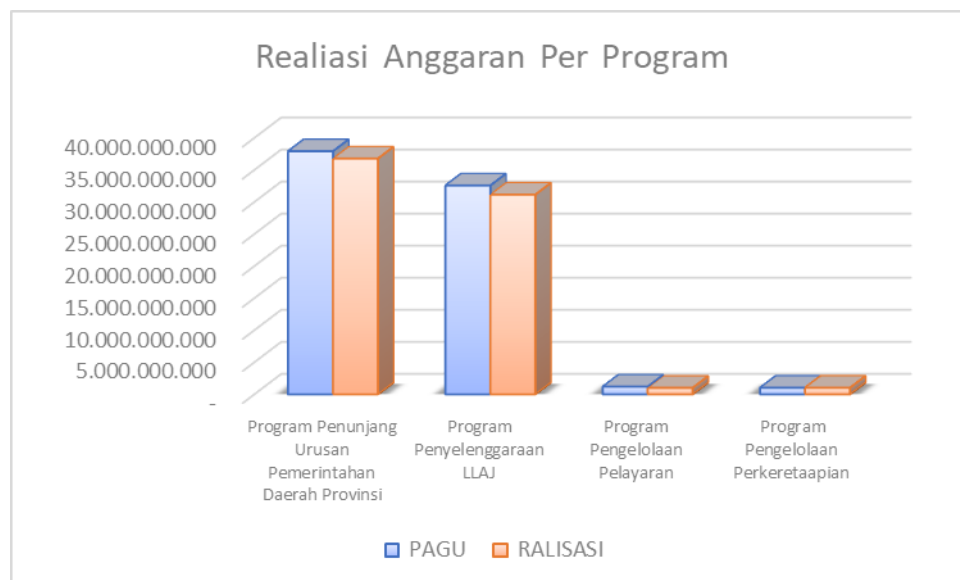
EKSEKUTIF

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

Dinas Pehubungan Provinsi Banten pada tahun 2023 memiliki anggaran murni sebesar Rp. 72.735.000.000,00 dimana sampai dengan bulan September 2023 realisasi keuangan mencapai Rp. 45.480.973.105,00 dengan prosentase capaian sebesar 62,52%.

Sementara untuk anggaran perubahan Dinas Perhubungan semula memiliki anggaran sebesar Rp. 72.735.000.000,00 menjadi Rp. 72.719.753.600,00 atau berkurang sebesar Rp. 15.246.400 dimana pada akhir penggaran perubahan 2023 realisasi keuangan mencapai Rp. 69.970.594.376,00 dengan prosentase capaian sebesar 96,22%.

NO	URAIAN	PAGU	RALISASI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	37.919.313.000	36.780.586.730
2	Program Penyelenggaraan LLAJ	32.574.891.600	31.147.278.846
3	Program Pengelolaan Pelayaran	1.196.941.000	1.014.120.800
4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1.028.608.000	1.028.608.000
		72.719.753.600	69.970.594.376



Dinas Perhubungan Provinsi Banten Pada Tahun 2023 memiliki 4 Program, 19 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan sebagai sarana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk Urusan Perhubungan Capaian Kinerja dari beberapa indikator Pada tahun 2023 ini bergaam sebagaimana penjelasan di bawah ini.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	69,77	80,00	114,66
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Rasio Konektifitas Provinsi	70,00	69,14	98,77
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	80	80,00	100,00
	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan	21,00	21,00	100,00

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dengan baik.

Adapun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan laporan ini. Untuk itu kami tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini.

Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasanya maupun segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin member saran dan kritik kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini.

Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembaca.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN**



TRI NURTOPO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19660530 199003 1 003

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	I-1
1.3. DASAR HUKUM	I-1
1.4. STRUKTUR ORGANISASI	I-3
1.5. ISU – ISU STRATEGIS	I-6
1.6. PROSES BISNIS	I-6
1.7. CASCADING	I-8
1.8. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP 2023	I-9
1.9. SISTEMATIKA PENULISAN	I-9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023 – 2026	II-1
2.2.1. VISI DAN MISI	II-1
2.2.2. TUJUAN DAN SASARAN	II-2
2.2.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	II-2
2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2023	II-3
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	II-7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	III-1
3.1.1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023	III-1
3.1.2. MEMBANDINGKAN ANATARA TARGET DAN REALISASI SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN BEBERAPA TAHUN LALU	III-13

3.3.3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI	III-34
3.3.4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET STANDAR NASIONAL	III-36
3.3.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN PENURUNAN KINERJA	III-36
3.1.6. ANALISIS ATAS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	III-40
3.1.7. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA	III-54
3.2. REALISASI ANGGARAN	III-62
BAB IV PENUTUP	IV-1
4.1. KESIMPULAN	IV-1
4.2. SARAN DAN REKOMENDASI	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status	I-4
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	I-4
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	I-5
Tabel 1.4. Cascading Dinas Perhubungan Provinsi Banten	I-8
Tabel 1.5. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	I-9
Tabel 2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Banten	II-3
Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2023	II-3
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten	II-8
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Banten	II-8
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	II-8
Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Angkutan dan Pengembangan Transportasi	II-10
Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Angkutan Jalan	II-10
Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pengembangan	II-10
Tabel 2.10. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan	II-11
Tabel 2.11. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Prasarana Jalan	II-11
Tabel 2.12. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Perlengkapan Jalan	II-11
Tabel 2.13. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Lalu Lintas	II-11
Tabel 2.14. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	II-11
Tabel 2.15. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Bina Keselamatan Lalu Lintas	II-12
Tabel 2.16. Perjanjian Kinerja Kepala Laut Udara Dan Perkeretaapian	II-12
Tabel 2.17. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Kepelabuhan Dan ASDP	II-12
Tabel 2.18. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Perhubungan Udara Dan Perkeretaapian	II-12
Tabel 2.19. Perjanjian Kinerja Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan	II-13
Tabel 2.20. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha Upt Pengelolaan Prasarana Perhubungan	II-13
Tabel 2.21. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Sarana Perhubungan Darat Dan Pengendalian Operasional Angkutan	II-13
Tabel 2.21. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Sarana Perhubungan Darat Dan Pengendalian Operasional Angkutan	II-14
Tabel 2.23. Target Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Banten	II-14
Tabel 2.24. Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis	II-15
Tabel 2.25. Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Banten Anggaran Perubahan Tahun 2023	II-15

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	III-1
Tabel 3.2. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023	III-1
Tabel 3.3. Realisasi Kinerja Program Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2023	III-2
Tabel 3.4. Target dan Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	III-4
Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Lalu	III-14
Tabel 3.6 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Lalu	III-15
Tabel 3.7. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan atau Sub Kegiatan Tahun 2023 dan Tahun Lalu	III-19
Tabel 3.8. Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target Renstra	III-34
Tabel 3.9. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	III-39
Tabel 2.10. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Sasaran pada Dinas Perhubungan	III-41
Tabel 3.11. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan	III-41
Table 3.12 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten	III-46
Tabel 3.13. Analisis Program Kegiatan Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja	III-55
Tabel 3.14. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023	III-62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur organisasi Dinas Perhubungan	I-3
Gambar 1.2. Jumlah pegawai berdasarkan status	I-4
Gambar 1.3. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan	I-5
Gambar 1.4. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan	I-5
Gambar 1.5. Peta proses bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Banten	I-9
Gambar 1.6. Peta sub proses bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Banten (1)	I-6
Gambar 1.7. Peta sub proses bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Banten (2)	I-7
Gambar 1.8. Peta sub proses bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Banten (3)	I-7
Gambar 1.9. Peta relasi Dinas Perhubungan Provinsi Banten	I-7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tahun 2023 merupakan tahun awal dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

berdasarkan hal tersebut maka Dinas Perhubungan telah menyusun Rencan Kerja Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026, dimana hal tersebut menjadu dasar pelaksanaan program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023.

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Banten memiliki 4 Program, 19 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan dengan Pagu sebesar Rp. 72.719.753.600

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Banten adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan 2023 -2026;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang khususnya dalam perencanaan kinerja;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5025)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2023;

15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah.
16. Peraturan Gubernur banten Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Sunan Organisasi dan tata Kerja;
17. Peraturan Gubernur banten Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah.;
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Daerah Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

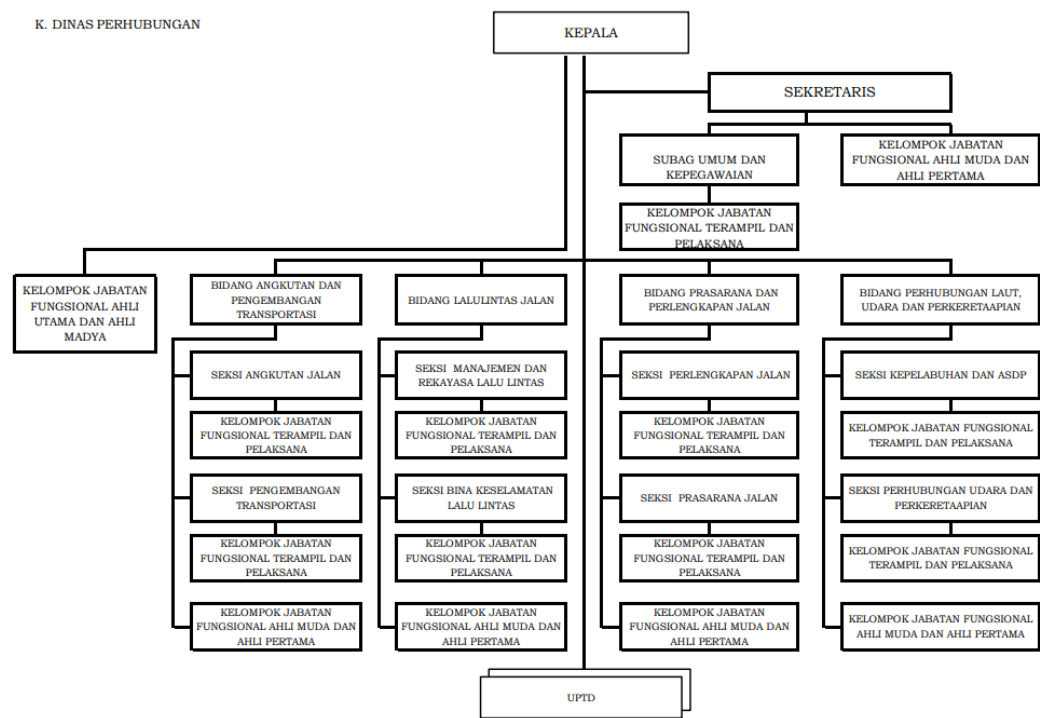
TUGAS POKOK

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

FUNGSI DAN WEWENANG

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan wewenang:

- a. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- b. Pengelolaan Pelayaran;
- c. Pengelolaan Penerbangan;
- d. Pengelolaan Perkeretaapian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undang.



Gambar 1.1. Struktur organisasi Dinas Perhubungan

KEADAAN PEGAWAI

Berdasarkan data Kepegawaian tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten Memiliki jumlah pegawai sebanyak 351 orang dimana 95 orang bersatatus sebagai PNS dan 256 orang bersatus sebagai Non PNS.

untuk lebih jelas mengenai data jumlah pegawai Dinas Perhubungan lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Bersasarkan Status

STATUS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
PNS	77	18	95
NON PNS	216	40	256
JUMLAH	293	58	351

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasrkan Pendidikan

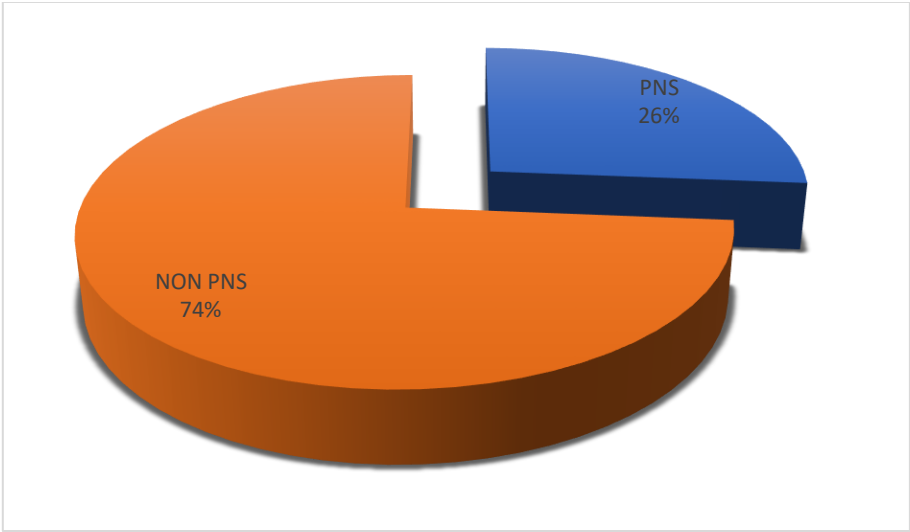
Jenjang	PNS	Non PNS	Jumlah
SD	-	2	2
SMP		3	3
SMA	24	159	183
DIPLOMA	5	11	16
S.1	40	81	121
S.2	26	0	26
JUMLAH	95	256	351

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

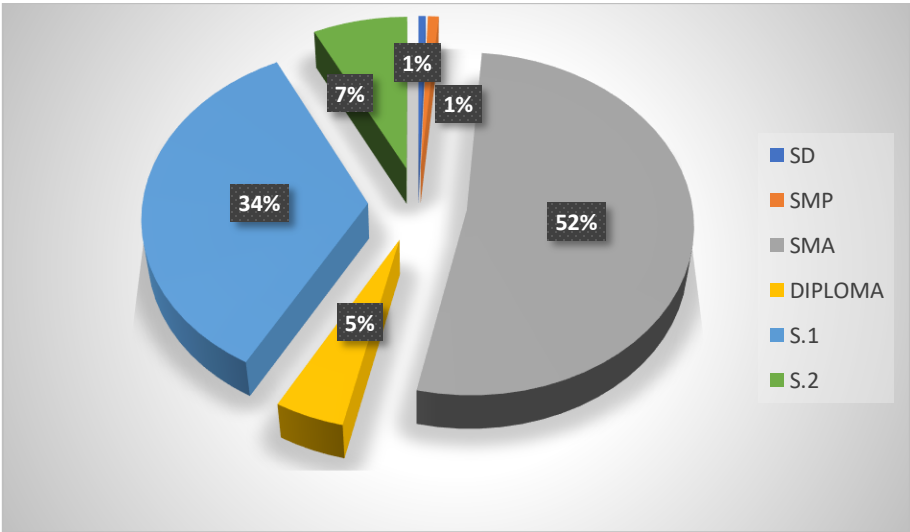
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasrkan Pangkat dan Golongan

GOL	I		II				III				IV				
	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e
Jmlh	0	0	5	0	16	1	6	7	10	30	14	5	0	1	0

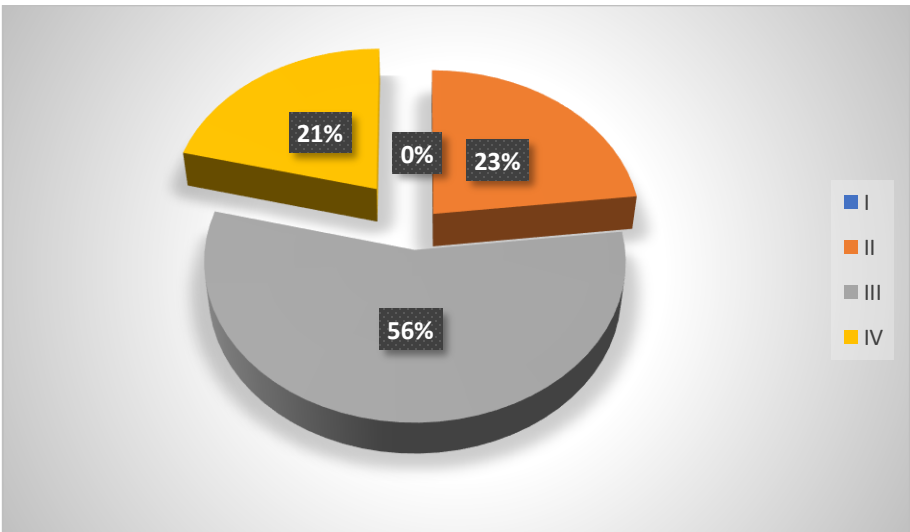
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten



Gambar 1.2. Jumlah pegawai berdasarkan status



Gambar 1.3. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan



Gambar 1.4. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

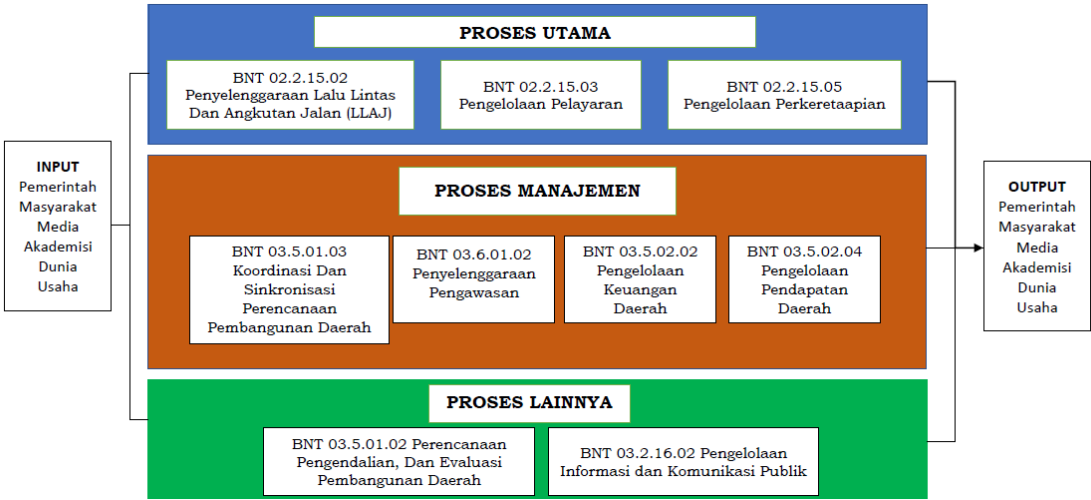
1.5. ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 memiliki isu strategis sebagaimana berikut:

1. Penanganan kemacetan yang perlu penanganan secara serius dan intens;
2. Pemenuhan Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan pemeliharaan/ penggantian;
3. Pemenuhan Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi;
4. Pengembangan sarana angkutan umum masal yang memadai sebagai upaya untuk menarik kembali pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke kendaraan umum sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengurangi kemacetan;
5. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) di perkotaan Serang Metropolitan Area (SMA);
6. Pembangunan Terminal Tipe-B;
7. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional;
8. Peningkatan profesioalisme aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Banten dan peningkatan fasilitas pendukungnya (sarana dan prasarana aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan di bidang transportasi.

1.6. PROSES BISNIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Banten tentunya memiliki mitara kerja agar pelaskaan pekerjaan menjadi efektif dan efiesien oleh karena itu perlu di susun sebuah peta proses bisnis agar meudahkan dalam komunikasi kepada pihak interna mau pun pihak eksternal. Untuk lebih jelas mengenai peta proses bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar – gambar di bawah ini.



Gambar 1.5. Peta proses bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Banten



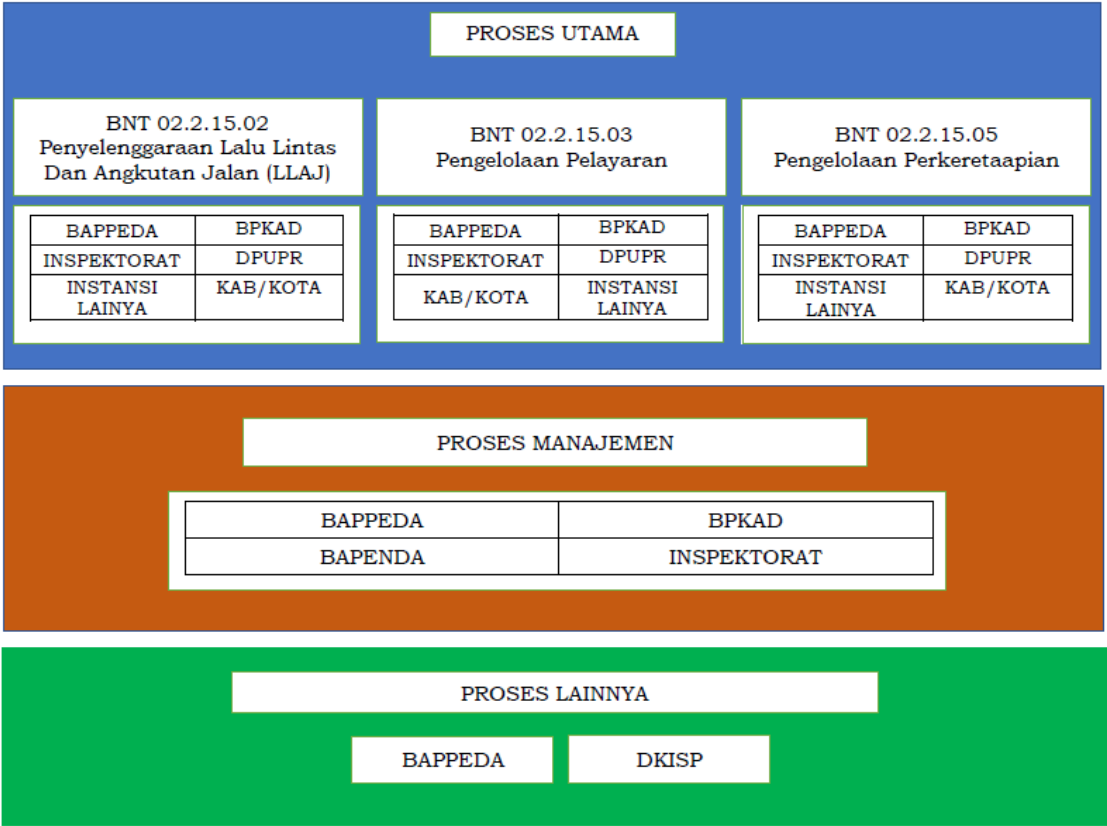
Gambar 1.6. Peta sub proses bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Banten (1)



Gambar 1.7. Peta sub proses bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Banten (2)



Gambar 1.8. Peta sub proses bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Banten (3)



Gambar 1.9. Peta relasi Dinas Perhubungan Provinsi Banten

1.7. CASCADING

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah

untuk lebih jelas mengenai *Cascading* Dinas Perhubungan Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4. *Cascading* Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Visi : Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggara pemerintah daerah pada perangkat daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran Dan pengendalian
Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing Secara Merata dan Berkeadilan			
Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Meningkatkan kualitas jalan provinsi	Pemenuhan kebutuhan perkelengkapan jalan
		Penetapan kebijakan	Penetapan kebijakan dan sosialisasi penataan

Visi : Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		transportasi	transportasi
		Optimalisasi kinerja jaringan pelayanan angkutan umum	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang
		Optimalisasi pelayanan pengawasan angkutan umum	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang
		Peningkatan Ketersediaan prasarana transportasi	Pembangunan prasarana jalan di jalan provinsi
		Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan
		Peningkatan perkeretaapian	Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah provinsi
		Peningkatan keselamatan dan koordinasi angkutan pelayaran, angkutan laut dan penerbangan	Penyelenggaraan keselamatan dan koordinasi angkutan pelayaran, angkutan laut, dan penerbangan

Sumber: Renstra Perubahan 2023-2026 Dinas Perhubungan

1.8. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP 2023

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Banten mendapat 1 (satu) point evaluasi, yang telah dilakukan oleh tim nasional penilaian SAKIP Provinsi Banten tahun 2022.

Untuk lebih Jelas mengenai hasil evaluasi SAKIP 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.5. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

NO	Hasil Evaluasi SAKIP 2022	Tindak Lanjut
1	Indikator belum berorientasi hasil yaitu Presentase kebutuhan sarana dan prasaran transportasi untuk sasaran meningkatnya kinerja pelayan, pembangunan sarana dan prasarana transpotasi yang lebih baik	Telah dilakukan kordinasi terkait perbaikan data dan penghitungan bersarkan Definini Operasional

Sumber: LHE AKIP Provinsi Banten 2022

1.9. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini terdiri dari Latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, tugas dan fungsi, Proses Bisnis sampai evaluasi AKIP Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja serta menyajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

BAB ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi

BAB II

PERENCANAAN KINEREJA

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023 – 2026

Tahun 2023 merupakan Tahun pertama memasuki era Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, namun seiring dengan kebijakan baru terkait susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang baru dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten, berimbas kepada kebijakan rencana pembangunan yang telah disusun sebelumnya, sehingga Rencana Strategis 2023-2026 turut mengalami perubahan.

Perubahan nomenklatur, susunan organisasi dan tata kerja tersebut membawa dampak beberapa perubahan dalam keberlangsungan operasional perangkat daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Banten, terutama dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, serta pelaksanaan tugas dan fungsi.

Perubahan ini juga sekaligus memperbaiki target-target kinerja, kebijakan anggaran, agar perencanaan pembangunan dan proses pembangunan berjalan sebagaimana mestinya sehingga didapatkan hasil yang maksimal.

Meskipun demikian perubahan ini secara substansif masih sama dengan Renstra sebelumnya yang membedakan pengampu kegiatan dan sub kegiatan mengikuti SOTK yang baru.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Perubahan ini pada sektor perhubungan pada masa transisi 2023 - 2026 ini, selain mengacu pada RPJPD 2005 – 2025 dan RTRW Provinsi Banten, juga memperhatikan ketercapaian target

RPJMD 2017 – 2022 (terdapat beberapa target dalam RPJMD yang belum tercapai).

2.1.1. VISI DAN MISI

Dalam penyelenggaraan pekerjaan Dinas Perhubungan Provinsi Banten mengacu pada Visi Pemerintah Provinsi Banten yaitu:

“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA”

Adapun Misi dari Pemerintah Provinsi Banten adalah:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;

4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa.

berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Banten mengemban **Misi 2** dan **Misi 4** yaitu **“Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan”** dan **“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa”**.

2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

Untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Banten 2023-2026, diuraikan dengan beberapa tujuan yang berisi pernyataan capaian didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Dalam tujuan disertakan pula indikator kinerja tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai pada masa akhir tahap perencanaan.

Tujuan pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2023 – 2026 diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan.
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, rasional, dan berjangka waktu tertentu. Sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun. Urusan perhubungan merupakan urusan bukan pelayanan dasar, sehingga kinerja Dinas Perhubungan mendukung capaian kinerja infrastruktur.

Sasaran dari tujuan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026 adalah:

1. Meningkatnya kinerja pelayanan, penyediaan sarana, prasarana, dan keselamatan.
2. Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan.

2.1.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Setiap strategi bisa untuk satu atau beberapa sasaran atau sebaliknya satu sasaran menggunakan beberapa strategi. Strategi memiliki parameter keberhasilan dan kegagalan yang berupa capaian indikator kinerja, pengelolaan kapasitas birokrasi, sistem manajemen atau implementasi teknologi.

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Tabel 2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Banten

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran Dan pengendalian
2	Meningkatkan kualitas jalan provinsi	Pemenuhan kebutuhan perkelengkapan jalan
3	Penetapan kebijakan transportasi	Penetapan kebijakan dan sosialisasi penataan transportasi
4	Optimalisasi kinerja jaringan pelayanan angkutan umum	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang
5	Optimalisasi pelayanan pengawasan angkutan umum	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang
6	Peningkatan Ketersediaan prasarana transportasi	Pembangunan prasarana jalan di jalan provinsi
7	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan
8	Peningkatan perkeretaapian	Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah provinsi
9	Peningkatan keselamatan dan koordinasi angkutan pelayaran, angkutan laut dan penerbangan	Penyelenggaraan keselamatan dan koordinasi angkutan pelayaran, angkutan laut, dan penerbangan

Sumber: Renstra Perubahan 2023 – 2026 Dinas Perhubungan

PROGRAM

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Banten memiliki 4 (empat) program untuk sebagai turunan srtategi dan kebijakan, dimana 4 program itu berupa:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- 3. Program Penyelenggaraan Pelayaran;
- 4. Program Penyelenggaraam Perkeretaapian.

2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2023

Penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten mengacu pada dokumen Renstra Perubahan 2023 – 2026 dengan memperhatikan Cascading yang dimulai dari Tujuan, Sasara, Strategi dan Arah Kebijakan sehingga menghasilkan Program dan Kegiatan.

Berdasarkan Dokuemen Renstra Perubahan 2023 – 2026 Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2023 memiliki 4 (empat) Program, 19 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2023

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
INDUK		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
		Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)
		Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Satuan : %)
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan (Satuan : %)
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah (Satuan : %)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Satuan : %)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN
9)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
10)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
11)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
12)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
13)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
14)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
15)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
16)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah
17)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
18)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
19)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
20)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
21)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
22)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
23)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
24)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
25)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
26)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
27)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	
		Persentase perencanaan transportasi yang diterapkan
		Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi
		Persentase pelaksanaan MRL dan penyediaan, pemeliharaan jalan
		Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas
		Persentase pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan
		Persentase Pemenuhankebutuhan angkutan masal
9	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase perencanaan transportasi yang diterapkan
28)	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
29)	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
30)	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
10	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
31)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
32)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara
11	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase pelaksanaan MRLI dan penyediaan, pemeliharaan jalan
33)	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan
34)	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
35)	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
12	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal
36)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
III	Program Pengelolaan Pelayaran	
		Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran
		Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan
13	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Pembangunan. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
37)	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan
38)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi
14	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	
39)	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
IV	Program Pengelolaan Perkeretaapian	
		Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian
15	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Terlaksananya Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian kewenangan provinsi
40)	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
UPTD		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan: %)
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)
41)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
42)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
43)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)
44)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
18	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
45)	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan
	Program Pengelolaan Pelayaran	
		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Pelayaran
19	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase ketercapaian kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
46)	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Pada Tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Banten menyusun Perjanjian Kinerja (PK) sebagai bentuk penugasan dari pimpinan lebih tinggi kepada pemimpin instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan indikator kinerja.

Untuk lebih jelas mengenai Perjanjian Kinerja pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten

NO	SASARAN STRTEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningaktnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaran Pemerinta	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah)	Nilai	70-80
2	Meningkatya Kinerja Pelayanan, Penyediaan Sarana, Prasarana dan Keselamatan Perhubungan	Rasio Konektivitas Provinsi	Persen	0,72
		Rasio Kejadian Kecelakaan per 100 ribu Keberangkatan	Persen	19,70
		Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	82,00

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Banten

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	4

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	97
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1
15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
16	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	148
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	81
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	74
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Angkutan dan Pengembangan Transportasi

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase perencanaan transportasi yang diterapkan	Persen	50
		Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan masal	Persen	100

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Angkutan Jalan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit	1

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pengembangan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	3
2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan	Dokumen	6

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		
3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	3

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.10. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi	Persen	25

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.11. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Prasarana Jalan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit	22

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.12. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Perlengkapan Jalan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	14

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.13. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Lalu Lintas

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Penyelenggaraan Lalul Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pelaksanaan MRLL dan penyediaan, pemeliharaan jalan	Persen	100
		Persentase pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan	Persen	100
		Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas	Persen	20

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.14. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	6

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
2	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	5

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.15. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Bina Keselamatan Lalu Lintas

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dokumen	6

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.16. Perjanjian Kinerja Kepala Laut Udara Dan Perkeretaapian

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran	Persen	100
		Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan	Persen	100
		Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian	Persen	100

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.17. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Kepelabuhan Dan ASDP

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Laporan	3
2	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	2

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.18. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Perhubungan Udara Dan Perkeretaapian

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Unit	2

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
2	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	Dokumen	5

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.19. Perjanjian Kinerja Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100
2	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal Pada UPT Pengelola Prasarana Perhubungan	Persen	100
3	Pengelolaan Pelayaran	Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan Pada UPT Pengelola Prasarana Perhubungan	Persen	100

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.20. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha Upt Pengelolaan Prasarana Perhubungan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.21. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Sarana Perhubungan Darat Dan Pengendalian Operasional Angkutan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan	Unit	1

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan		

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.22. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Laut Dan Udara UPT Pengelolaan
Prasarana Perhubungan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Unit	1

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

ANGGARAN

Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun 2023 memiliki anggaran murni sebesar Rp. 72.735.000.000,00 dimana sampai dengan bulan September 2023 realisasi keuangan mencapai Rp. 45.480.973.105,00 dengan prosentase capaian sebesar 62,52%.

Sementara untuk anggaran perubahan Dinas Perhubungan semula memiliki anggaran sebesar Rp. 72.735.000.000,00 menjadi Rp. 72.719.753.600,00 atau berkurang sebesar Rp. 15.246.400 dimana pada akhir penggaran perubahan 2023 realisasi keuangan mencapai Rp. 69.893.463.536,00 dengan prosentase capaian sebesar 96,11%.

TARGET BELANJA

Pada anggaran perubahan tahun 2023 memiliki target belanja terbagi kedalam beberpa jenis sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.23. Target Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Banten

NO	URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	295.360.000	43.045.000
I	Retribusi Daerah	295.360.000	43.045.000
B	BELANJA DAERAH		
I	Belanja Operasi	61.978.015.471	60.301.559.415
1	Belanja Pegawai	24.162.664.000	23.448.944.000
2	Belanja Barang dan Jasa	37.815.351.471	36.852.615.415
II	BELANJA MODAL	10.756.984.529	12.418.194.185
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.504.262.952	2.508.754.934
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.959.606.000	3.934.606.000
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.293.115.577	5.974.833.251
Jumlah Belanja Daerah		72.735.000.000	72.719.753.600

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

ALOKASI ANGGARAN

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Banten mengalokasikan anggaran berdasrkan capaian dan sasaran strategis sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.24. Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	PERSENTASE	KETERANGAN
1	Meningaktnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaran Pemerinta	37.869.023.000	52,07	
2	Meningkatya Kinerja Pelayanan, Penyediaan Sarana, Prasarana dan Keselamatan Perhubungan	34.850.730.600	47,93	

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.25. Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Banten Anggaran Perubahan Tahun 2023

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU
INDUK		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	37.592.403.000
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	467.578.000
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.790.000
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	245.868.000
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.920.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.615.859.000
8)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.844.114.000
9)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	604.830.000
10)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	88.325.000
11)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.150.000
12)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	34.971.000
13)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34.944.000
14)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.525.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.514.500
15)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.514.500
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93.250.000
16)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	93.250.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.113.706.600
17)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	480.000.000
18)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	299.206.500
19)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.038.100
20)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.860.000
21)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.602.000
22)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	654.240.700

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	654.240.700
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.476.557.800
23)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.476.557.800
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.160.696.400
24)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.147.710.000
25)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000
26)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	962.986.400
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	32.359.331.100
9	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	2.107.394.200
27)	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	691.506.000
28)	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	686.743.700
29)	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	729.144.500
10	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	3.371.900.000
30)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	3.147.088.000
31)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	224.812.000
11	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	25.610.022.100
32)	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	22.650.542.100
33)	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	504.920.000
34)	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	2.454.560.000
12	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.270.014.800
35)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.270.014.800
III	Program Pengelolaan Pelayanan	1.096.941.000
13	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	845.948.000
36)	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200.948.000
37)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	645.000.000
14	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	250.993.000
38)	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	250.993.000
IV	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1.028.608.000
15	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	1.028.608.000
39)	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1.028.608.000
UPTD		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	326.910.000
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.390.000
40)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.000.000
41)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000
42)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.390.000

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU
17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.520.000
43)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133.520.000
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	215.560.500
18	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	215.560.500
45)	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	215.560.500
	Program Pengelolaan Pelayaran	100.000.000
19	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100.000.000
46)	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100.000.000
JUMLAH		72.719.753.600

Sumber: DPAP Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pada tahun 2023 Dinas perhubungan Provinsi Banten akan melaksanakan evaluasi penilaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun baik di level Gubernur dengan Kepala Dinas, Kepala Dinas dengan Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon III dengan Pejabat Eselon IV.

Pengukuran evaluasi kinerja ini akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan melakukan evaluasi kinerja ini diharapkan beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun ini akan dapat teratasi untuk tahun berikutnya.

berikut adalah skala nilai dari peringkat kinerja sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91≤100	Sangat Tinggi
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan hasil evaluasi internal Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun 2023 beberapa Capaian Indikator Kinerja Utama telah melebihi target yang telah ditetapkan pada Dokumen Renstra Perubahan 2023 – 2026.

3.1.1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Untuk lebih jelas mengenai realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	69,77	80,00	114,66	Evaluasi internal Dinas Perhubungan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Rasio Konektifitas Provinsi	70,00	69,14	98,77	Evaluasi internal Dinas Perhubungan
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	80	80,00	100,00	Evaluasi internal Dinas Perhubungan
	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan	21,00	21,00	100,00	Evaluasi internal Dinas Perhubungan

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 3.3. Realisasi Kinerja Program Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2023

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan:%)	100	100	100
	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Satuan:%)	100	100	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan (Satuan:%)	100	100	100
	Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah (Satuan:%)	100	100	100
	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (Satuan:%)	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Satuan:%)	100	100	100
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase perencanaan transportasi yang diterapkan	100	100	100
	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi	100	100	100
	Persentase pelaksanaan MRLl dan penyediaan, pemeliharaan jalan	100	100	100
	Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas	100	100	100
	Persentase pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan	100	100	100
	Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan masal (UPTD)	100	100	100

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran	100%	100	100
	Persentase Ketersediaan dan Pengawasan epelabuhanan	100%	100	100
Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian	100%	100	100

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	4	100

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	102	102	100
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1	100
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	12	12	100

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	100%	100%
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100%
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		2	2	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	100

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	77	77	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	60	60	100
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	78	78	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)		100%	100%	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora	1	1	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)		100%	100%	100%

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		100%	100%	100%
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	3	3	100
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	5	5	100
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	3	3	100
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Jumlah unit Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		100%	100%	100%
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	11	11	100
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit	22	22	100
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Jumlah unit Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		100%	100%	100%

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	6	6	100
		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dokumen	6	6	100
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	6	6	100
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah unit Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		100%	100%	100%
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Unit	1	1	100
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		100%	100%	100%
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Unit	1	1	100

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi		Jumlah laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi		100%	100%	100%
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Unit	2	2	100
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Laporan	3	3	100
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		100%	100%	100%
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regiona	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Unit	1	1	100
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	2	2	100
	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi		Jumlah dokumen Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi		100%	100%	100%

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	Dokumen	5	5	100

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Banten

**3.1.2. MEMBANDINGKAN ANATARA TARGET DAN REALISASI SERTA CAPAIAN KINERJA
TAHUN INI DENGAN BEBERAPA TAHUN LALU**

Dalam perbandingan data realisasi kinerja terdapat beberapa perbedaan sarana dan indikator kinerja pada tahun 2020 sampai dengan 2022 dengan sasaran kinerja pada tahun 2023, hal ini bisa terjadi karena perbedaan masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah selsai yaitu tahun 2017 – 2022.

Pada tahun 2023 Provinsi Baneten telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana RPD ini di susun berdasarkan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

dengan adanya transisi dari RPJMD menjadi RPD akan berdampak pada perbedaan sasaran dan indikator kinerja.

Untuk melihat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Lalu

Sasaran	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian			Sasaran	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022			2023	2023	2023
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Capaian Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	80	85	85	76,73	80,85	85	95,91	94,88	100	Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	69,77	80,00	114,66
Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Rasio Konektifitas Provinsi	70,00	69,14	98,77
	Prosentase Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat, Laut dan Udara	100	100	100	100	96,26	100	100	96,26	100		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	80	80,00	100,00
Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan	20	20	21	100	19.92	21,00	100	99,10	100		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan	21,00	21,00	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 3.6 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Lalu

Program	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian			Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022			2023	2023	2023
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian Dengan Parameter Penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan:%)	-	100	100	-	97,62	100	-	97,62	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)	100	100	100
	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan:%)	-	100	100	-	100	100	-	100	100		Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Satuan : %)	100	100	100
	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Mendukung kelancaran tugas dan Fungsi Administrasi	-	100	100	-	98,00	100	-	98,00	100		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	100

Program	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian			Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022			2023	2023	2023
	Perangkat Daerah (Satuan:%)											n (Satuan : %)			
	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan Fungsi SKPD (Satuan:%)	-	100	100	-	100	100	-	100	100		Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah (Satuan : %)	100	100	100
	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan:%)	-	100	100	-	100	100	-	100	100		Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (Satuan : %)	100	100	100
	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %) (UPTD)	-	100	100	-	70,00	-	-	70,00	100					

Program	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian			Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022			2023	2023	2023
												Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Satuan : %)	100	100	100
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Perencanaan Transportasi Yang Diterapkan	50	50	50	50	50	50	100	100	100	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase perencanaan transportasi yang diterapkan	100	100	100
	Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi	100	100	100
	Persentase Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas	20	20	20	20	20	20	20	20	20		Persentase pelaksanaan MRL dan penyediaan, pemeliharaan jalan	100	100	100
	Persentase Ketersediaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jaringan Jalan	-	15	25	-	15	24,08	-	100	96,32		Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas	100	100	100
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Angkutan Massal	-	100	10	-	100	10	-	100	100		Persentase pengendalian, penertiban dan pengawasan	100	100	100

Program	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian			Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022			2023	2023	2023
												penyelanggar aan angkutan			
	Persentase Ketersediaan Dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi	-	30,77	38,46	-	30,77	38,46	-	100	100		Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan masal (UPTD)	100	100	100
Program Pengeolaan Pelayaran	Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan	-	100	100	-	100	100	-	100	100	Program Pengeolaan Pelayaran	Persentase Pengendalian , Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran	100	100	100
	Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran	-	100	100	-	87,77	100	-	87,77	100		Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan	100	100	100
	Persentase Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional	-	100	100	-	100	100	-	100	100	-	-	-	-	-
	Persentase Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional (UPTD)	-	100	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-

Program	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian			Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022			2023	2023	2023
Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian	-	15	100	-	15	100	-	100	100	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian	100	100	100

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 3.7. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan atau Sub Kegiatan Tahun 2023 dan Tahun Lalu

KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2022	2022	2022			2023	2023	2023
Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	97,61	97,61	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan	1	1	100	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1	1	100%

KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2022	2022	2022			2023	2023	2023
	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	5	83,33	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102	102	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	100	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	2	100	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	100%

KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2022	2022	2022			2023	2023	2023
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	12	100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	100	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	100%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100	100	100	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	100	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	100%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	100	-	-	-	-	-

KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2022	2022	2022			2023	2023	2023
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tertatanya Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100					
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	100	100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	1	100	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	2	100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	1	100	-	-	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	100	100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembayaran listrik kantor	1	1	100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	100	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100%

KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2022	2022	2022			2023	2023	2023
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaraanny a Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	100	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	100	100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1	1	100	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	77	77	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	100	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	13	13	100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100	100	100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%

KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2022	2022	2022			2023	2023	2023
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	12	100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	60	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	12	12	100	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78	78	100%
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terpeliharanya Aset Tak Berwujud	12	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	100	-	-	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	100	-	-	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	12	100	-	-	-	-	-

KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2022	2022	2022			2023	2023	2023
Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)		100	100	100	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	100%	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembayaran Listrik kantor UPTD	1	1	100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan peralatan kantor UPTD	1	1	100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan kordinasi UPTD	12	1	8,33	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional lapangan UPTD	1	1	100	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan mesin (UPTD)	1	1	100	-	-	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor (UPTD)	1	1	100	-	-	-	-	-

KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2022	2022	2022			2023	2023	2023
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen studi jaringan transportasi	1	1	100	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	3	3	100%
	Dokumen studi Prasarana transportasi	2	2	100	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	5	5	100%
	Dokumen studi sarana transportasi	1	1	100	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	3	3	100%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah unit Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	100%	100%	100%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Terlaksananya Pembangunan Halte	5	5	100	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	11	11	100%
	Terlaksananya Kegiatan DED JPO pada ruas Jalan Syech Nawawi Al- Bantani dan DED Halte di Jalan Provinsi	2	2	100	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	22	22	100%
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang	2	2	100	-	-	-	-	-

KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2022	2022	2022			2023	2023	2023
	Terlaksananya Pembangunan Pos Pintu Perlindungan Sebidang Kereta Api di Wilayah Provinsi Banten	1	1	100	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		100	96,32	96,32	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah unit Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	100%	100%	100%
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan	1	1	100	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	6	6	100%
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pengadaan dan Pemasangan LPJU/APJ (Mekanikal dan Elektrikal) (Listrik PLN)	217	217	100	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	6	6	100%
	Pengadaan Armature LPJU (EKataloge) Smart Sistem 120 Watt LED	430	430	100	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	6	6	100%
	Pengadaan dan Pemasangan LPJU/APJ (Mekanikal	33	33	100	-	-	-	-	-

KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2022	2022	2022			2023	2023	2023
	dan Elektrikal) (Listrik PLN) Stang Ornamen								
	Pengadaan dan Pemasangan Marka Zebra Corss	48	48	100	-	-	-	-	-
	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar	384	384	100	-	-	-	-	-
	Pengadaan dan Pemasangan RPPJ/RPPJ Kata - Kata	6	6	100	-	-	-	-	-
	Pengadaan Rambu Peringatan Jenis VMS (Variable Message Sign)	1	1	100	-	-	-	-	-
	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100	100	100	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Provinsi	100	63,19	63,19	-	-	-	-	-
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan	1	0	0	-	-	-	-	-

KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2022	2022	2022			2023	2023	2023
	Provinsi								
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100	100	100	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	0	0	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengemudi Angkutan Umum dan terlaksananya seleksi pengemudi teladan	1	0	0	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Jalan dan Inspeksi dan Audit Keselamatan LLAJ (	1	1	100	-	-	-	-	-
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100	100	100	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	100%	100%
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi dan Penataan Jaringan	10	10	100	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	1	1	100%

KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2022	2022	2022			2023	2023	2023
Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Trayek Angkutan Umum AKDP				Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
	Tersedianya Perlengkapan Pendukung Operasional Bus Sekolah / Wisata	2	2	100	-	-	-	-	-
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100	100	100	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	100%	100%
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	100	100	100	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	1	1	100%
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi	Jumlah laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam	100	100	100	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi	Jumlah laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam	100%	100%	100%

KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2022	2022	2022			2023	2023	2023
pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi				pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi			
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Pengawasan Terhadap KKOP	1	1	100	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	2	2	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pemantauan dan Pengendalian Angkutan Laut	1	1	100	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	3	3	100%
	Terlaksananya Pembinaan keselamatan Pelayaran	1	0	0	-	-	-	-	-
Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional					-	-	-	-	-
Pelaksanaan Penyusunan	Terlaksananya Pembangunan dan	2	2	100	-	-	-	-	-

KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2022	2022	2022			2023	2023	2023
Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Pengembangan Kepelabuhanan (Jasa Konsultasi Studi Potensi Pembangunan di 2 lokasi)								
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	2	0	0	-	-	-	-	-
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100	100	100	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100%	100%	100%
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Terselenggaranya pengendalian penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan	100	100	100	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	1	1	100%
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan pengumpan regional	100	100	100	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2	2	100%
Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Jumlah dokumen Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	100	33,33	33,33	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Jumlah dokumen Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	100%	100%	100%

KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2022	2022	2022			2023	2023	2023
Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Persentase Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	3	1	33,33	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	5	5	100%

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

3.3.3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET KINERJA
DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN
PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan target pada renstra tahun 2023 – 2026 ada realisasi melebihi target capaian, hal ini terjadi karena realisasi dari indikator kinerha melebihi target yang di usulkan. Sementara untuk capain indikator lainnya sesuai dengan target yang telah disusun.

Tabel 3.8. Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2023		Target Renstra 2023
						Target	Realisasi	
	Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	100	100	100
				Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100
				Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100
				Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah	%	100	100	100
				Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	%	100	100	100
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	%	100	100	100
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Rasio Konektifitas Provinsi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase perencanaan transportasi yang diterapkan	%	100	100	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2023		Target Renstra 2023
						Target	Realisasi	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi		Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi	%	100	100	100
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan		Persentase pelaksanaan MRLI dan penyediaan, pemeliharaan jalan	%	100	100	100
				Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas	%	100	100	100
				Persentase pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan	%	100	100	100
				Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan masal (UPTD)	%	100	100	100
			Program Pengelolaan Pelayanan	Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayanan	%	100	100	100
				Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan	%	100	100	100
			Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian	%	100	100	50

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

3.3.4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET STANDAR NASIONAL

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten tidak memiliki program atau kegiatan yang mendukung indikator makro sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran atau perbandingan kinerja dengan Standar Nasional

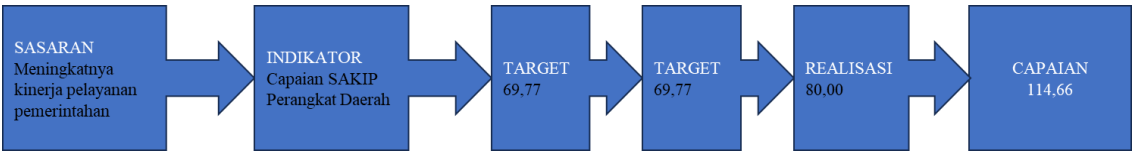
3.3.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN PENURUNAN KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi internal Dinas Perhubungan Provinsi Banten telah diketahui sejauh mana kegagalan dan keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, dengan diketahuinya keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan maka perlu diambil langkah – langkah antisipatif serta strategi dalam menanggulangi permasalahan yang ada sehingga permasalahan tersebut dapat diantisipasi di kemudian hari.

Untuk lebih jelas mengenai penyebab keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

1. Capaian Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Sasaran 1 memiliki indikator berupa Capaian SAKIP Perangkat Daerah dengan capaian pada dokumen



berdasarkan hasil evaluasi internal hasil penilaian SAKIP Dinas Perhubungan Provinsi Banten adalah 80,00 dimana capaian 114,66 dari target yang ditentukan sebesar 66,77. dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{80}{66,77} \times 100 = 114,66$$

Hasil dari penilaian SAKIP telah tercapai akan tetapi masih terdapat catatan yaitu:

- a. Untuk mengoptimalkan aktivitas kinerja dalam rencana aksi sebagai upaua dalam mencapai perjanjian kinerja.
- b. Meningkatkan kualitas evaluasi internal atas capaian indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah

2. Capaian Sasaran 2 Rasio Konektifitas Provinsi

Capaian sasaran 2 merupakan pengukuran rasio konektivitas Provinsi dimana hal ini mengukur konektivitas antara moda transportasi yang ada di Wilayah Provinsi Banten dimana penghitungan rasio konektivitas provinsi ini mencakup bobot angkutan jalan ditambah dengan bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

untuk lebih jelas mengenai penghitungan Rasio Konektivitas Provinsi dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

$$\begin{aligned} &= (IK\ 1 \times \text{Bobot angkutan jalan}) + (IK\ 2 \times \text{bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan}) \\ &= (0,98 \times 70) + (0 \times 30) \\ &= 69,14 + 0 \\ &= 69,14 \end{aligned}$$

Dari capain rasio konetifitas ini terdapat penurunan capaian hal ini dikarenakan adanya trayek yang pengelolaan nya sudah tidak efektif sehingga perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap jaringan trayek.

➤ Capaian Sasaran 2 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

Untuk mengukur indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Banten melakukan survei kepda masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan perhubungan kepada masyarat, target yang telah ditentukan senilai 80, untuk mengetahui beberapa point yang dinilai dari IKM Sektor Transportasi sebagai berikut:

1) Kartu Pengawasan (Baru)	Nilai: 85,61 (Puas)
2) Perlengkapan Jalan (Halte)	Nilai: 81,25 (Puas)
3) Perlengkapan Jalan (Marka)	Nilai: 81,25 (Puas)
4) Perlengkapan Jalan (Penerangan Jalan Umum)	Nilai: 83,33 (Puas)
5) Perlengkapan Jalan (Rambu Lalu Lintas)	Nilai: 76,92 (Puas)
6) Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)	Nilai: 67,32 (Cukup puas)
7) Penjagaan Dan Pengaturan Lalu Lintas (Gatur Lalin)	Nilai: 83,04 (Puas)
8) Mudik Gratis	Nilai: 81,94 (Puas)
Hasil rata – rata	Nilai: 80,00 (puas)

Berdasarkan hasil keseluruhan nilai rata – rata IKM Dinas Perhubungan mendapat nilai 80 maka secara capaian telah 100%

$$\frac{80}{80} \times 100 = 100$$

akan tetapi ada point dari penilaian yang masih kurang baik, oleh karena itu akan dilakukan evaluasi terhadap penilaian yang kurang baik tersebut.

- **Capaian Sasaran 3 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan**
- berdasarkan dari hasil pengukutran internal untuk sasaran capaian 3 rasio kejadian kecelakaan transportasi per 100 ribu keberangkatan Dinas Perhubungan mendapat nilai 21 dari target nilai 21 dengan capaian sebesar 100%

$$\frac{21}{21} \times 100 = 100$$

Analisis dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	69,77	80,00	114,66	1. Untuk mengoptimalkan aktivitas kinerja dalam rencana aksi sebagai upaua dalam mencapai perjanjian kinerja. 2. Meningkatkan kualitas evaluasi internal atas capaian indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah	Melakukan koordinasi dan perbaikan pada capain kinerja yang dirasa belum memenuhi capaian kinerja
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Rasio Konektifitas Provinsi	70,00	69,14	98,77	Pada indikator angkutan jalan terdapat beberapa pelimpahan trayek yang diberikan dari pemerintah Kabupaten/Kota sehingga mempengaruhi jumlah kuota angkutan dan jumlah trayek yang ada	Melakukan kaji ulang terhadap kebutuhan angkutan agar tidak terjadi ketimpangan trayek
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	80	80,00	100,00	Pada point penyelenggaraan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) memiliki nilia paling renda yaitu 67,32 (Cukup puas)	Perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja palayanan AKDP yang berada di Wilyah Provinsi Banten
	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan	21,00	21,00	100,00	-	-

Sumber: Dnas Perhubungan Provinsi Banten

3.1.6. ANALISIS ATAS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan didukung dengan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana dalam pelaksanaanya perlu dilakukan analisis kebutuhan sehingga dapat memilih kebutuhan prioritas dan menghindari penggunaan anggaran yang mubazir dan memenuhi azas efektif dan efisien.

Tabel 2.10. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Sasaran pada Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah		69,77	80,00	114,66	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	37.919.313.000	36.474.854.164	96,19
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Rasio Konektifitas Provinsi		70,00	70,00	100,00	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	32.359.331.100	30.945.988.866	95,63
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi		80	80,00	100,00	Program Pengelolaan Pelayaran	1.196.941.000	927.862.700	77,52
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan		21,00	21,00	100,00	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1.028.608.000	51.477.160	92,50
Tingkat Efisiensi										3,89%
Tingkat Efektifitas										104,93%

Sumber Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Untuk tingkat efektifitas dan efisiensi Kinerja Program dan Kegiatan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.11. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan

No	Program / Kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
INDUK									
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					37.592.403.000	36.474.854.164	97,03	2,97
		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program	100	100	100				

No	Program / Kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							
		Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100				
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	100				
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah	100	100	100				
		Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (Satuan : %)	100	100	100				
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100	100	100				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	467.578.000	396.207.508	84,74	15,26
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	23.615.859.000	22.760.545.971	96,38	3,62
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	10.514.500	10.182.000	96,84	3,16
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	93.250.000	93.073.658	99,81	0,19
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	1.113.706.600	1.019.111.688	91,51	8,49
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	654.240.700	624.253.394	95,42	4,58

No	Program / Kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	9.476.557.800	9.414.402.449	99,34	0,66
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	2.160.696.400	2.157.077.496	99,83	0,17
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)					32.359.331.100	30.945.988.866	95,63	4,37
		Persentase perencanaan transportasi yang diterapkan	100	100	100				
		Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi	100	100	100				
		Persentase pelaksanaan MRL dan penyediaan, pemeliharaan jalan	100	100	100				
		Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas	100	100	100				
		Persentase pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan	100	100	100				
		Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan masal	100	100	100				
9	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase perencanaan transportasi yang diterapkan	100	100	100	2.107.394.200	1.999.642.500	94,89	5,11
10	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	100	100	100	3.371.900.000	3.251.495.442	96,43	3,57
11	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase pelaksanaan MRL dan penyediaan, pemeliharaan jalan	100	100	100	25.610.022.100	24.489.207.333	95,62	4,38
12	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal	100	100	100	1.270.014.800	1.205.643.591	94,93	5,07
III	Program Pengelolaan Pelayaran					1.096.941.000	927.862.700	84,59	15,41

No	Program / Kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
		Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran	100	100	100				
		Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan	100	100	100				
13	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Pembangunan. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100	100	100	845.948.000	719.719.500	85,08	14,92
14	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100	100	100	250.993.000	208.143.200	82,93	17,07
IV	Program Pengelolaan Perkeretaapian					1.028.608.000	951.477.160	92,50	7,50
		Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian	100	100	100				
15	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Terlaksananya Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian kewenangan provinsi	100	100	100	1.028.608.000	951.477.160	92,50	7,50
UPTD									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					326.910.000	305.732.566	93,52	6,48
		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100				
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)	100	100	100	193.390.000	184.716.416	95,51	4,49
17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan	100	100	100	133.520.000	121.016.150	90,64	9,36

No	Program / Kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
		pemerintahan daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)							
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)					215.560.500	201.289.980	93,38	6,62
		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100	100	100				
18	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100	100	100	215.560.500	201.289.980	93,38	6,62
	Program Pengelolaan Pelayaran					100.000.000	86.258.100	86,26	13,74
		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Pelayaran	100	100	100				
19	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase ketercapaian kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100	100	100	100.000.000	86.258.100,00	86,26	13,74
Jumlah Capaian dan Realisasi			100	100	100	72719753600	69893463536	96,11	3,89

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Table 3.12 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten

N0	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	467.578.000	396.207.508	84,74	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100	67.790.000	56.777.170	83,75	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100	10.000.000	8.940.444	89,40	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100	10.000.000	9.389.994	93,90	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100	10.000.000	5.390.000	53,90	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100	10.000.000	6.925.000	69,25	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Dokumen	4	4	100	245.868.000	218.206.400	88,75	

N0	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100	113.920.000	90.578.500	79,51	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	23.615.859.000	22.760.545.971	96,38	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	102	102	100	22.844.114.000	22.234.422.451	97,33	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100	604.830.000	417.170.000	68,97	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	100	88.325.000	64.305.860	72,81	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1	100	1.150.000	1.035.080	90,01	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	100	34.971.000	15.491.520	44,30	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	12	12	100	34.944.000	24.036.480	68,79	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	100	7.525.000	4.084.580	54,28	

N0	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	100%	100	10.514.500	10.182.000	96,84	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100	10.514.500	10.182.000	96,84	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100%	93.250.000	93.073.658	99,81	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Paket	2	2	100	93.250.000	93.073.658	99,81	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	1.113.706.600	1.019.111.688	91,51	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	480.000.000	455.306.942	94,86	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	299.206.500	279.355.126	93,37	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	100	45.038.100	34.625.380	76,88	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100	47.860.000	47.566.890	99,39	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	191.602.000	152.827.350	79,76	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100	50.000.000	49.430.000	98,86	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	654.240.700	624.253.394	95,42	

N0	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
	Urusan Pemerintah Daerah									
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	77	77	100	654.240.700	624.253.394	95,42	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	9.476.557.800	9.414.402.449	99,34	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	9.476.557.800	9.414.402.449	99,34	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	2.160.696.400	2.157.077.496	99,83	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	60	60	100	1.147.710.000	1.146.648.263	99,91	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	78	78	100	50.000.000	49.474.795	98,95	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100	962.986.400	960.954.438	99,79	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)		100%	100%	100%	193.390.000	184.716.416	95,51	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	70.000.000	69.100.726	98,72	

N0	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	70.000.000	67.377.360	96,25	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100	53.390.000	48.238.330	90,35	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)		100%	100%	100%	133.520.000	121.016.150	90,64	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100	133.520.000	121.016.150	90,64	
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	2.107.394.200	1.999.642.500		
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	3	3	100	691.506.000	670.989.001	97,03	
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	5	5	100	686.743.700	645.021.178	93,92	
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	3	3	100	729.144.500	683.632.321	93,76	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah unit Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		100%			3.371.900.000	3.251.495.442	96,43	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	11	11	100	3.147.088.000	3.052.297.000	96,99	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit	22	22	100	224.812.000	199.198.442	88,61	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu	Jumlah unit Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu		100%	100%	100%	25.610.022.100	24.489.207.333	95,62	

N0	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
	Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi								
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	6	6	100	22.650.542.100	21.830.553.570	96,38	
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dokumen	6	6	100	504.920.000	402.515.213	79,72	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	6	6	100	2.454.560.000	2.256.138.550	91,92	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		100%	100%	100%	1.270.014.800	1.205.643.591	94,93	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit	1	1	100	1.270.014.800	1.205.643.591	94,93	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		100%	100%	100%	215.560.500	201.289.980	93,38	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1	100	215.560.500	201.289.980	93,38	

N0	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
	Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan								
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jumlah laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi		100%	100%	100%	845.948.000	719.719.500	85,08	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan		2	2	100	200.948.000	161.363.000	80,30	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi		3	3	100	645.000.000	558.356.500	86,57	
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		100%	100%	100%	350.993.000	294.401.300	83,88	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi		1	1	100	100.000.000	86.258.100	86,26	

N0	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
	Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regiona	Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian								
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		2	2	100	250.993.000	208.143.200	82,93	
	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Jumlah dokumen Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi		100%	100%	100%	1.028.608.000	951.477.160	92,50	
	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan		5	5	100	1.028.608.000	951.477.160	92,50	

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

**3.1.7. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PUN
KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Pada anggaran tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Banten memiliki 4 Program yang menjadi penunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 3. Program Pengelolaan Pelayaraan
- 4. Program Pengelolaan Perkeretaapian

untuk lebih jelas mengenai rincian program dan kegiatan yang menunjang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.13. Analisis Program Kegiatan Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
	Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	100				
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Menunjang
					Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang
					Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	Menunjang
					Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	100	Menunjang
					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100	Menunjang
				Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Menunjang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Menunjang

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102	Menunjang
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Menunjang
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Menunjang
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Menunjang
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Menunjang

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Menunjang
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Menunjang
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Menunjang
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	77	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Menunjang
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Rasio Konektifitas Provinsi		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	Menunjang

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	100	Menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			Menunjang
					Persestase perencanaan transportasi yang di terapkan	100	Menunjang
					Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal	100	Menunjang
					Persentase pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan	100	Menunjang
					Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi	100	Menunjang
					Persentase pelaksanaan MRLI dan penyediaan, pemeliharaan jalan	100	Menunjang
					Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas	100	Menunjang
					Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal (UPTD)	1	Menunjang
				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	3	Menunjang
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	5	Menunjang

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	3	Menunjang
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah unit Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	100	Menunjang
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	11	Menunjang
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	22	Menunjang
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah unit Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	100	Menunjang
				Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	6	Menunjang
				Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	6	Menunjang
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	6	Menunjang
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100	Menunjang
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	Menunjang
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100	Menunjang

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	1	Menunjang
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Menunjang
					Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran	100	Menunjang
					Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan	100	Menunjang
				Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jumlah laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	100	Menunjang
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	2	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	3	Menunjang
				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100	Menunjang

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regiona	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	1	Menunjang
				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2	Menunjang
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian	100	Menunjang
				Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Jumlah dokumen Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	100	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	5	Menunjang

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Penyesuaian Strategi dan Kebijakan atas capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian indikator kinerja baik sasaran dan program seperti yang diuraikan, maka diperlukan beberapa penyesuaian atas strategi dan kebijakan organisasi. Penyesuaian strategi guna mencapai kebijakan pada tahun mendatang, sebagai berikut :

- 1. Penyesuaian aktivitas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan indikator kinerja sasaran dan program pada dokumen perencanaan kinerja;
- 2. Penyesuaian anggaran melalui evaluasi pelaksanaan kgiatan dengan memprioritaskan anggaran pada kegiatan yang mendukung indicator kinerja utama organisasi

Sedangkan dalam melaksanakan strategi tersebut, kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas perencanaan untuk medukung pencapaian sasaran organisasi yang telah direncanakan;
- 2. Komitmen dalam peningkatan kompetensi SDM agar mampu melaksanakan tugas-tugas sesuai tupoksinya.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun 2023 memiliki anggaran murni sebesar Rp. 72.735.000.000,00 dimana sampai dengan bulan September 2023 realisasi keuangan mencapai Rp. 45.480.973.105,00 dengan prosentase capaian sebesar 62,52%.

Sementara untuk anggaran perubahan Dinas Perhubungan semula memiliki anggaran sebesar Rp. 72.735.000.000,00 menjadi Rp. 72.719.753.600,00 atau berkurang sebesar Rp. 15.246.400 dimana pada akhir penggaran perubahan 2023 realisasi keuangan mencapai Rp. 69.970.594.376,00 dengan prosentase capaian sebesar 96,22%.

Untuk lebih jelas mengenai realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.14. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.592.403.000	36.474.854.164	97,03
2	15	1	1.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	467.578.000	396.207.508	84,74
2	15	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.790.000	56.777.170	83,75
2	15	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	8.940.444	89,40
2	15	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	9.389.994	93,90

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2	15	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	5.390.000	53,90
2	15	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	6.925.000	69,25
2	15	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	245.868.000	218.206.400	88,75
2	15	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.920.000	90.578.500	79,51
2	15	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.615.859.000	22.760.545.971	96,38
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.844.114.000	22.234.422.451	97,33
2	15	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	604.830.000	417.170.000	68,97
2	15	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	88.325.000	64.305.860	72,81
2	15	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.150.000	1.035.080	90,01
2	15	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	34.971.000	15.491.520	44,30
2	15	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	34.944.000	24.036.480	68,79
2	15	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.525.000	4.084.580	54,28
2	15	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.514.500	10.182.000	96,84
2	15	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.514.500	10.182.000	96,84
2	15	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93.250.000	93.073.658	99,81
2	15	1	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	93.250.000	93.073.658	99,81
2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.113.706.600	1.019.111.688	91,51
2	15	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	480.000.000	455.306.942	94,86
2	15	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	299.206.500	279.355.126	93,37
2	15	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.038.100	34.625.380	76,88
2	15	1	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.860.000	47.566.890	99,39
2	15	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.602.000	152.827.350	79,76
2	15	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000	49.430.000	98,86

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2	15	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	654.240.700	624.253.394	95,42
2	15	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	654.240.700	624.253.394	95,42
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.476.557.800	9.414.402.449	99,34
2	15	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.476.557.800	9.414.402.449	99,34
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.160.696.400	2.157.077.496	99,83
2	15	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.147.710.000	1.146.648.263	99,91
2	15	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	49.474.795	98,95
2	15	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	962.986.400	960.954.438	99,79
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	32.359.331.100	30.945.988.866	95,63
2	15	2	1.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.107.394.200	1.999.642.500	94,89
2	15	2	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	691.506.000	670.989.001	97,03
2	15	2	1.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	686.743.700	645.021.178	93,92
2	15	2	1.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	729.144.500	683.632.321	93,76
2	15	2	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	3.371.900.000	3.251.495.442	96,43
2	15	2	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	3.147.088.000	3.052.297.000	96,99
2	15	2	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	224.812.000	199.198.442	88,61
2	15	2	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	25.610.022.100	24.489.207.333	95,62
2	15	2	1.05	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam	22.650.542.100	21.830.553.570	96,38

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
					rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			
2	15	2	1.05	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	504.920.000	402.515.213	79,72
2	15	2	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	2.454.560.000	2.256.138.550	91,92
2	15	2	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.270.014.800	1.205.643.591	94,93
2	15	2	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.270.014.800	1.205.643.591	94,93
2	15	2	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	215.560.500		-
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.096.941.000	927.862.700	84,59
2	15	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	845.948.000	719.719.500	85,08
2	15	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200.948.000	161.363.000	80,30
2	15	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	645.000.000	558.356.500	86,57
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	250.993.000	208.143.200	82,93
2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	250.993.000	208.143.200	82,93

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.028.608.000	1.028.608.000	100,00
2	15	05	1.06		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	1.028.608.000	1.028.608.000	100,00
2	15	05	1.06	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1.028.608.000	1.028.608.000	100,00
UPTD								
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	326.910.000	305.732.566	93,52
2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	193.390.000	184.716.416	95,51
2	15	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.000.000	69.100.726	98,72
2	15	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000	67.377.360	96,25
2	15	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.390.000	48.238.330	90,35
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	133.520.000	121.016.150	90,64
2	15	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133.520.000	121.016.150	90,64
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	215.560.500	201.289.980	93,38
2	15	2	1.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	215.560.500	201.289.980	93,38
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	100.000.000	86.258.100	86,26
2	15	03	1.09	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regiona	100.000.000	86.258.100	86,26
					JUMLAH	72.719.753.600	69.970.594.376	96,22

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESEMPULAN

Dari akuntabilitas kinerja pada BAB III dapat disimpulkan bahwa Dinas Pehugungan Provinsi Banten memiliki 4 Program, 19 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Capaaian Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja dari 5 indikator kinerja yang telah di tetapkan pada tahun 2023 diperoleh beberapa nilai capaian sebagaimana penjelasan di bawah ini.

1. Capaian indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Banten memiliki nilai 80 dari target dengan nilai 66,77 dengan capaian kinerja sebesar 114,66%.
2. Capaian indikator Rasio Konektifitas Provinsi memiliki nilai 69,14 dari target nilai 70,00 dengan capaian kinerja 98,77%.
3. Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi memiliki nilai 80,00 dari target 80,00 dengan capaian kinerja 100%.
4. Capaian indikator Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan memiliki nilai 21 dari target 21 dengan capaian kinerja 100%.

B. Realisasi Anggaran

Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun 2023 memiliki anggaran murni sebesar Rp. 72.735.000.000,00 dimana sampai dengan bulan September 2023 realisasi keuangan mencapai Rp. 45.480.973.105,00 dengan prosentase capaian sebesar 62,52%.

Sementara untuk anggaran perubahan Dinas Perhubungan semula memiliki anggaran sebesar Rp. 72.735.000.000,00 menjadi Rp. 72.719.753.600,00 atau berkurang sebesar Rp. 15.246.400 dimana pada akhir penggaran perubahan 2023 realisasi keuangan mencapai Rp. 69.970.594.376,00 dengan prosentase capaian sebesar 96,22%.

4.2. SARAN DAN REKOMENDASI

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Penerintah Daerah (LKjIP) Dinas Pehubungan tahun 2023 terdapat beberapa permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan penyusunanya oleh kerana itu perlu diusulkan beberapa rekomendasi sebagai bahan evaluasi penyusunan lapaoran selanjutya.

1. Sebelum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) ini perlu dilakukan rapat pada setiap bidang untuk menyampaikan progres capaian program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan laporan ini.
2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan gambaran secara teknis tata cara penyusunan LKjIP.
3. Melakukan *Update* data untuk mendapatkan informasi terbaru agar dalam penyusunan LKjIP dapat lebih akurat.
4. Melakukan evaluasi internal sebelum laporan ini disampaikan pada instansi berwenang untuk melakukan evaluasi dan perbaikan Penyusunan LKjIP ini.